

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu negara tidak akan dapat menjamin keberlangsungan hidupnya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain hal inilah yang menjadikan hubungan internasional sangat penting bagi negara. Sebuah negara sangat membutuhkan bantuan dari negara lain bertujuan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Hubungan internasional sendiri adalah di mana hubungan yang mencakup segalanya baik dari aspek kemanusiaan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, HI sendiri harus melibatkan dua negara atau boleh lebih. Hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang secara resmi ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian yaitu perdamaian antara Jepang dengan Indonesia dan juga bersamaan pula di waktu itu penandatanganan perjanjian pampasan perang pada masa perang yakni April 1958. Maka dalam perkembangannya, hubungan internasional merupakan interaksi antar negara-bangsa yang melewati batas-batas teritorial suatu negara. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan untuk menentukan tindakan sesuai dengan kepentingan negara masing-masing. Negara merdeka di dunia saling mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan bagi negara terkecuali harus berinteraksi satu sama lain. (Robert, 2009)

Ikatan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain dapat berlangsung dalam berbagai macam bentuk kerja sama. Kerja sama yang berlangsung di dunia Internasional pada dasarnya disebabkan, oleh suatu pemahaman jika suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Indonesia dan Jepang mempunyai Hubungan yang sangat erat dari

sejak era kolonialisme hingga saat ini, meskipun memiliki Hubungan sejarah yang kurang baik pada masa kolonialisme. Saat ini kedua negara tersebut telah menjalin hubungan yang sangat erat dalam wujud kerja sama serta pertukaran di bermacam bidang semacam politik, ekonomi, kebudayaan serta ilmu Kekayaan Intelektual. Semenjak tahun 1960-an Indonesia sudah menerima dorongan ekonomi yang lumayan besar dari Jepang dibanding dengan dorongan dari negara-negara barat.

Jika dilihat dari nilai sejarahnya, ikatan bilateral Indonesia dan Jepang mempunyai kaitan yang sangat erat serta menarik. Kedua negara tersebut telah menjalani hubungan kerja sama diberbagai bidang semacam politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Semenjak tahun 1960-an Indonesia sudah menerima dorongan ekonomi yang lumayan besar dari Jepang dibanding dengan dorongan dari negara negara barat. Mengalirnya dorongan bantuan Jepang ke Indonesia seiring dengan adanya akibat dari krisis-krisis politik ekonomi yang timbul pada akhir tahun 1965.

Dalam hubungan internasional interaksi utama antara pemerintahan dan antar bangsa sebenarnya aspek ekonomi, salah satu bentuk interaksi dalam dunia internasional yaitu pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang. Seperti contoh pemberian bantuan dari Jepang melalui JICA kepada negara berkembang. Jepang dianggap salah satu negara maju, hali ini terbukti dari sejarah jepang yang berubah drastis dari negara miskin menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang besar.

JICA (*Japan International Cooperation Agency*) merupakan lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Salah satu negara berkembang yang dibantu JICA adalah Indonesia di mana dalam implementasinya JICA membantu Indonesia di berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, perdagangan,

investasi, energi, hukum, kekayaan intelektual dan lain-lain. JICA bertugas untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara penerima bantuan melalui kerja sama teknis, pinjaman dan hibah yang didasarkan kepada kepentingan masing-masing negara. Ada banyak isu yang menjadi fokus dari JICA dalam melaksanakan misinya untuk membantu negara berkembang yaitu, infrastruktur ekonomi yang masih berkembang, pengurangan tingkat kemiskinan dan pemberdayaan SDM dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. (Reski, 2014) Pemerintah Indonesia menempatkan perhatian yang besar terhadap pengembangan di berbagai sektor khususnya, sektor kekayaan Intelektual yang bertujuan agar pemerintahan mampu bergerak maju untuk meningkatkan kontribusi sektor industri yang berbasis inovasi dan pengetahuan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

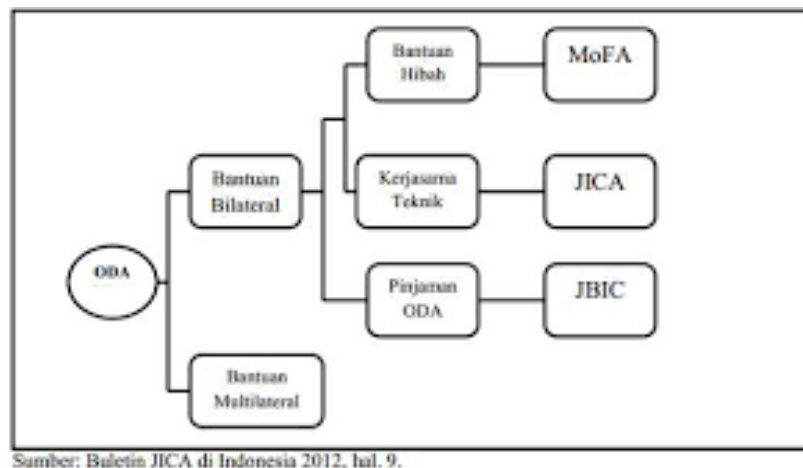
Pada 1 oktober tahun 2003 JICA dijadikan sebuah lembaga mandiri dan pada tahun 2004 pemerintah jepang mempunyai strategi bantuan untuk pembangunan negara berkembang berdasarkan Hubungan Bilateral seperti indonesia. Adapun kegiatan kegiatan JICA bagi Negara berkembang yang mempunyai kesepakatan bilateral dengan JICA: (JICA, 2006)

- a. Kerja sama teknis
  - 1) Pelatihan di berbagai negara berkembang
  - 2) Program pelaksanaan pelatihan teknik
- b. Pengiriman tenaga ahli
  - 1) Project expert
  - 2) Ahli individu

- c. Program teknik proyek
- d. *Development study program*
- e. Pelatihan tenaga berkualitas
- f. *Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOVC)*
- g. *Quality Workforce Training*

Sejak adanya *Colombo Plan* pada tahun 1954, Jepang terus meningkatkan berbagai kerja sama dan memanfaatkan teknologi yang berkerangka bantuan. ODA (*Official Development Assistance*) merupakan bantuan pembangunan resmi dari pemerintah Jepang yang disusun oleh komite bantuan pembangunan dari organisasi untuk kerja sama, ODA dalam pelaksanaannya memiliki beragam bentuk kemitraan yaitu (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus dengan kebutuhan masing pihak. ODA memiliki 2 rangka yaitu ODA bilateral dengan ODA multilateral, dalam rangka bilateral bertugas memberikan kontribusi hubungan jepang dengan berbagai negara berkembang yang dirancang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ODA multilateral bertugas menyalurkan berbagai organisasi internasional dengan aspek yang dibutuhkan, jaminan netral politik dan juga memberikan fasilitas bagi negara yang susah dijangkau oleh jepang sendiri. Selain itu ODA terdapat juga berbagai bagian dan juga tugas yaitu ada MOFA (*Ministry of Foreign Affair of Japan*) bertugas sebagai bantuan hibah, lalu ada JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) bertugas sebagai pinjaman dana dan yang terakhir ada kerja sama teknis guna untuk mendukung pembangunan SDM, penanggung jawab pelaksanaan kerja sama teknis dengan negara bantuan berdasarkan kesepakatan bilateral, maka dibentuklah organisasi yang bekerja

sama sekarang dengan DJKI yaitu JICA (*Japan International Cooperation Agency*).  
([dgip.go.id](http://dgip.go.id), dgip) Berikut gambaran penyaluran bantuan ODA



**Gambar 3. 1** **Gambaran Penyaluran Bantuan ODA (*Official Development Assistance*)**

Adapun fungsi JICA sebagai perantara oleh Jepang yang bertujuan untuk berinteraksi dengan negara-negara berkembang lainnya, setiap kerja sama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh JICA memberikan pengaruh dari kebijakan luar negeri Jepang itu sendiri, sehingga setiap kerja sama apapun yang khususnya pemberian bantuan kepada negara berkembang dapat memberikan dampak yang baik bagi kepentingan nasional Jepang. (JICA, 2017)

Kerja sama JICA dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya DJKI menandakan adanya kerja sama internasional yang bersifat bilateral. Kesepakatan kerja sama ini merupakan bentuk sarana perpanjangan kepentingan nasional Jepang dengan Indonesia, peningkatan sistem Kekayaan Intelektual, dan juga bantuan yang diberikan JICA untuk DJKI berguna untuk membangun sistem Kekayaan Intelektual.

<sup>1</sup> JICA, *Loc. Cit.*, hal 9

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kerja sama DJKI dengan JICA mengenai proyek perlindungan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual?

## C. Kerangka Teori

### **Teori Kerja sama Internasional**

Sudah jadi bagian dalam kehidupan berbangsa serta bernegara jika tiap bangsa di dunia ini hendak melakukan Interaksi antar-bangsa. Yang mana terselenggaranya sesuatu jalinan internasional baik lewat kriteria sesuatu jalinan yang bertabiat Bilateral, Regional, maupun Multilateral. Menurut K.J Holsti kerja sama internasional merupakan suatu hubungan yang dapat teridentifikasi dari sarana bersama dengan menggunakan suatu metode tertentu sehingga dapat mencapai tujuan dari hasil kerja sama tersebut. (Holsti K. J., 1977) Adanya kerja sama internasional dapat terwujudkan atas dasar memiliki kepentingan bersama dengan tujuan yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama internasional dapat didahului dengan tindakan-tindakan yang di salurkan melalui hubungan suatu negara dengan negara lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kerja sama internasional diperlukan bagi setiap negara agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan.

Pada dasarnya tujuan suatu negara melakukan kerja sama internasional dengan negara laian yaitu guna memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak didapatkan didalam negri. Sehingga suatu negara perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di negara luar dengan melakukan kerja sama untuk dapat saling mempertemukan kepentingan negaranya masing-masing. Dalam melakukan kerja sama internasional, suatu negara setidaknya memiliki syarat utama yaitu:

- a) Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat;
- b) Adanya keputusan yang dilakukan bersama dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Dan untuk melakukan hal tersebut diperlukan komunikasi dan juga konsultasi secara berkesinambungan.

Kerja sama internasional merupakan alat bagi aktor-aktornya yang berfungsi memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari kerja sama internasional sendiri adalah untuk mencapai usaha yang lebih baik atau lebih besar dibandingkan jika suatu negara melakukan atau mengupayakan sendiri tanpa bantuan dari negara lain.

Dalam K.J Holsti memberikan beberapa alasan mengapa negara memerlukan bentuk interaksi kerja sama internasional antar negara untuk mencapai suatu tujuan yang saling menguntungkan, diantaranya;

1. Berguna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Melalui kerja sama dengan negara lain negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki.
2. Dapat mengurangi kerugian yang di akibatkan oleh tindakan individual suatu negara yang akan timbul dampak ke negara lain.

Kerja sama internasional dapat dilakukan dengan baik jika kerja sama tersebut dapat saling merasakan hasil dari kesepakatan operasional tersebut. Adanya timbul kerja sama internasional karena, setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri baik dari segi jasa ataupun segi barang yang dibutuhkan. Hal tersebut di setiap negara sangatlah berbeda-beda sehingga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya keadaan geografis yang

berbeda, serta tingkat teknologi yang diterapkan. Agar kerja sama tersebut berhasil dan saling menguntungkan, maka kerja sama anatar negara diatur dalam bentuk organisasi internasionalnya masing-masing. Adapun bentuk-bentuk kerja sama antar negara dibagi bebrapa bentuk, diantaranya;

1. Bentuk kerja sama internasional melalui hubungan bilateral

Bentuk kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara, kerja sama bilateral bertujuan untuk menjalin hubungan menjadi lebih baik.

2. Bentuk kerja sama internasional melalui hubungan multilateral

Bentuk dalam hubungan multilateral merupakan kerja sama lebih dari dua negara. Organisasi ini seperti PBB (perserikatan bangsa-bangsa) dan juga WTO (*world trade organization*) yang bersifat multilateral, kerja sama ini hanya mengatur kepentingan umu dan bersifat terbuka.

Hubungan bilateral tidak jauh dari unsur diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara, maka dari itu diplomasi merupakan instrumen politik luar negeri yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan negara termasuk meningkatkan sistem teknis kekayaan intelektual dan juga sumber daya manusia (SDM). (Holsti K. , 1993)

Kerja sama antara *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandakan adanya Hubungan kerja sama internasional yang bersifat Bilateral. Jepang memilih indonesia karena ingin membantu indonesia berkembang dalam hal sistem teknis, sedangkan bagi indonesia. Jepang mempunyai kemampuan teknologi yang maju hal itu menjadikan Jepang sebagai negara yang patut diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik. Sehingga terjalinlah sebuah kerja sama



dalam berbagai bidang anatar Jepang dengan Indonesia melalui organisasi JICA. (Irsan, 2007)

#### D. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

##### 1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi mata kuliah Magang
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja di lingkungan Kementerian hukum dan hak asasi manusia
- c. Mendeskripsikan dan Menggambarkan mengenai proses implemtasi kerja sama yang dilakukan DJKI dengan JICA

##### 2. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini memiliki 3 manfaat bagi mahasiswa, program studi dan instansi itu sendiri.

###### a. *Bagi Mahasiswa*

- 1) Mendapatkan data penelitian sebagai Tugas Akhir mahasiswa S1 Hubungan Internasional UMY;
- 2) Untuk menerapkan keterampilan praktis dari teori yang didapatkan secara formal dalam kegiatan belajar mengajar selama di Universitas terhadap KEMENKUMHAM
- 3) Sebagai sarana pembelajaran dan mendapat ilmu praktik yang tidak didapat dalam kelas
- 4) Sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan masyarakat luas

5) Untuk menguji kemampuan mahasiswa menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di dunia kerja;

6) 6. Untuk meningkatkan *softskill*.

**b. *Bagi Program Studi Hubungan Internasional***

1) Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul sesuai dengan visi kampus;

2) Sebagai sarana pengenalan kepada mahasiswa mengenai fenomena hubungan internasional dalam kegiatan perekonomian khususnya Hukum dan Hak Asasi Manusia

**c. *Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia***

1) Sebagai sarana melatih insan muda menghadapi permasalahan negara dalam kegiatan merek, paten dan juga keamanan produk

2) Sebagai sarana memperkenalkan mahasiswa tentang isu-isu dan kerja sama yang ditugaskan Kemenkumham

3) Meningkatkan produktivitas dengan mendapatkan bantuan tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan kecil

**E. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan yang digunakan merupakan penelitian kualitatif di mana berfokus kepada analisis penelitian data-data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai bagaimana implementasi kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan JICA dalam proyek perlindungan Hukum dan Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada pegawai DJKI yang

merupakan tim yang mengikuti atau mengurus kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia maupun di Jepang, lalu penulis juga menggunakan data berkas seperti agenda KCCP atau salah satu contoh agenda seperti seminar di Jepang bersama pihak JICA dan Kemenkumham, lalu ada data *MoU* resmi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku bukti kerja sama antara JICA dan Kemenkumham. Penulis juga menggunakan penelitian teknik analisis deskriptif dengan bertujuan memberikan data-data secara resmi dan akurat yang telah dikumpulkan penulis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut;

#### a. Teknik Dokumentasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen dapat didefinisikan sebagai berkas yang berisikan teks yang dibuat oleh perangkat lunak dan juga definisi lain yakni rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti keterangan. (KBBI, 2016) Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa sumber dari hasil laporan JICA, KEMENKUMHAM, DJKI, sumber media berupa rekaman asli hasil wawancara dengan pegawai DJKI khususnya di intelijen kerja sama untuk dijadikan bahan penelitian.

## b. Studi Keputusan

Penulis tidak hanya memperoleh data dan mempelajari dokumen yang diperoleh dari JICA, DJKI, KEMENKUMHAM, penulis juga akan mengumpulkan data hasil studi pustaka dari beberapa jurnal terkait kerja sama JICA.

## c. Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah tanya jawab dengan Pegawai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengikuti kegiatan kerja sama ini langsung di Indonesia maupun kegiatan di Jepang dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan adalah informasi yang belum tercantum pada laporan JICA dan DJKI dan sumber tertulis lainnya.

Dari penelitian ini, aspek Hubungan internasional itu sendiri yaitu Bagaimana Implementasi Kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan JICA. Kerja sama antara dua pihak bisa dikategorikan sebagai hubungan antara 2 organisasi perwakilan yaitu hubungan antara organisasi tingkat internasional atau biasa disebut *on-Governmental Organization* (NGO) dengan perwakilan pemerintahan. (Kemenkumham, 2016)

## 2. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang beralamat di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia

## 3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan *work from office*, 5 hari kerja yaitu Senin sampai dengan Kamis.

*a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan*

Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan terhitung mulai di tanggal 10 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

*b. Alasan Memilih Lokasi Kegiatan*

Alasan mengapa penulis memilih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah karena sesuai dengan konsentrasi yang dipilih pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan juga penulis ingin sekali merasakan kerja secara langsung di bagian kementerian. Karena penulis berasal dari jurusan Hubungan Internasional maka penulis ditempatkan di bagian kerja sama dan pemberdayaan internasional. DJKI di bagian kerja sama juga sering melakukan banyak perjanjian MoU dan negosiasi dengan beberapa negara, sehingga Sering kali apa yang telah dipelajari pada saat masih di bangku perkuliahan tentu akan berguna dengan praktik yang ada di lapangan.

**F. Rencana Sistematika**

Ada pun sistematika dari penulisan antara lain sebagai berikut:

**Bab I**, pada bab ini terdapat pendahuluan sebagai dasar dari penelitian yang mencakup abstrak, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan rencana sistematika.

**Bab II**, pada bab ini berisi laporan magang seperti profil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kegiatan magang selama di DJKI dan juga kendala apa saja yang terjadi selama magang.

**Bab III**, bab ini akan berisi pembahasan tentang bagaimana proses kerja sama antara JICA dengan DJKI, Kontribusi HI dan juga apa saja program-program yang dilakukan pada saat kerja sama itu berlangsung.

**Bab IV**, bab ini berisi kesimpulan dan juga saran.